

SIARAN PERS

“LAWAN KEJAHATAN INDUSTRI ROKOK!

Mencapai Perlindungan Optimal Bagi Anak-anak, Masyarakat Miskin dan Perempuan dari Bahaya Rokok Melalui Akses FCTC, Peningkatan Cukai dan Pembatalan RUU Pertembakauan”

Jakarta, 1 Juni 2014

Tingginya peningkatan perokok pemula setiap tahun serta makin buruknya epidemi rokok di Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya harga rokok. Sementara itu komponen utama dalam peningkatan harga rokok yaitu cukai, belum mencapai persentase yang maksimal disebabkan oleh manipulasi fakta dan data dari industri rokok yang menimbulkan keengganan pemerintah meningkatkan cukai rokok, meskipun kenaikan cukai rokok justru akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara.

Di sisi lain, industri rokok menggunakan berbagai cara untuk mencegah pemerintah Indonesia, yang merupakan salah satu negara penggagas Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) untuk mengaksesinya, tertinggal dari 178 negara dunia termasuk Somalia. Sedangkan DPR justru menggagas RUU Pertembakauan yang dirancang khusus untuk melindungi kerajaan bisnis para pengusaha rokok.

Ironis, bahwa fakta adanya industri yang memproduksi produk pembunuh massal yang menyebabkan 239 ribu kematian pertahun¹ tidak membuat pemerintah Indonesia khawatir dan bergerak untuk melindungi 250 juta jiwa penduduknya, melainkan justru memilih untuk membela kepentingan para pengusaha industri rokok yang memperoleh gelar orang terkaya di Indonesia dari hasil keuntungan penjualan 4.000 substansi beracun, 69 diantaranya karsinogenik di dalam satu produk unggulan mereka.

Keberpihakan pemerintah yang berat sebelah dapat dilihat dari berbagai pernyataan dan sikap yang dikeluarkan oleh para pejabat eksekutif maupun legislatif yang menolak mengesahkan aturan pengendalian tembakau untuk menyelamatkan jutaan anak-anak yang ditargetkan menjadi konsumen rokok, dan justru mendorong untuk menciptakan legislasi yang melindungi industri.

Rakyat telah lelah dengan sikap pemerintah dan DPR yang terlihat jelas menganakemaskan para pengusaha industri rokok dan menjadikan 260 juta jiwa sebagai anak tiri, yang kepentingan serta perlindungannya selalu dinomerduakan. Seolah menegaskan sikap pemerintah dan DPR bahwa: tidak mengapa 260 juta jiwa mati sia-sia, asalkan para pengusaha industri rokok sejahtera.

Oleh karena itu, Komnas Pengendalian tembakau bersama-sama dengan 300 orang anggota organisasi masyarakat, mahasiswa dan siswa di daerah Jabodetabek memeringati peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, mengajak serta masyarakat yang meramaikan car free day pada hari ini untuk ikut melakukan perlawanan terhadap kejahatan industri rokok, mendesak pemerintah dan DPR untuk mengaksesi FCTC, menaikkan cukai rokok dan membatalkan RUU Pertembakauan demi terjaminnya masa depan generasi bangsa.



Mengenai Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan Yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi kemasyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.

¹ Sawarta Keser, GATS 2011